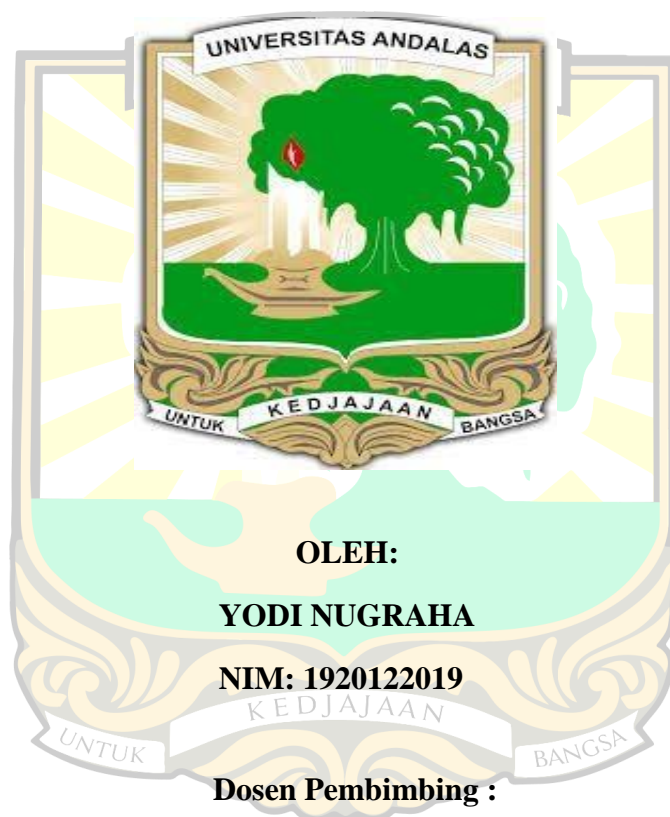


**KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DENGAN
DASAR PENERBITAN SURAT PALSU (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BATUSANGKAR NOMOR 67/Pid.B/2021/PN Bsk)**

TESIS

*Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



OLEH:

YODI NUGRAHA

NIM: 1920122019

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. REMBRANDT, S.H., M.Pd.**
- 2. Dr. SYOFIRMAN SOFYAN, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2023

**KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DENGAN
DASAR PENERBITAN SURAT PALSU (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BATUSANGKAR NOMOR 67/Pid.B/2021/PN Bsk)**

(Yodi Nugraha, 1920122019, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 140 Halaman, 2023)

ABSTRAK

Di dalam proses penerbitan sertipikat, diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, pemong desa maupun pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertipikat tersebut. Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, daluwarsa, bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertipikat yang cacat hukum. Kasus sengketa pertanahan dengan objek sengketa sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan dengan menggunakan surat palsu adalah Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sengketa dalam kasus ini terletak di Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepastian hukum sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan surat palsu? Dan Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini, yaitu Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan dengan menggunakan surat palsu, tentu tidak memberikan kepastian hukum. Sertipikat ini dapat dikategorikan sebagai sertipikat asli tapi palsu. Sertipikat semacam ini, tentunya harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku serta ditarik dari peredaran setelah dibuktikan melalui proses di Pengadilan Negeri. Untuk mencegah terjadinya sertipikat asli tapi palsu ini yaitu dengan meningkatkan ketelitian aparat yang memproses pembuatan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Sertipikat, Hak Atas Tanah Penerbitan, dan Surat Palsu

**LEGAL CERTAINTY OF CERTIFICATES OF LAND RIGHTS ON THE
BASIS OF THE ISSUANCE OF FAKE CERTIFICATES (STUDY OF THE
BATUSANGKAR DISTRICT COURT DECISION NUMBER
67/Pid.B/2021/PN Bsk)**

(Yodi Nugraha, 1920122019, *Notarial Master Program, Faculty of Law, Andalas University, 140 Pages, 2023*)

ABSTRACT

In the process of issuing certificates, a process is required that involves the applicant, adjoining landowners, pemong desa and related agencies to obtain explanations and letters as the basis for rights related to the application for the certificate. Explanations both oral and written from related parties have the opportunity for falsification, expiration, and sometimes they are not true or fictitious resulting in legally flawed certificates. The land dispute case with the object of the dispute over land rights certificates issued using a forged letter is the Decision of the Class II Batusangkar District Court Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk which has obtained permanent legal force. The dispute in this case is located in Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Rbatan District, Tanah Datar Regency. The formulation of the problem in this study is how legal certainty is the certificate of land rights issued based on a forged letter? And how does the panel of judges consider in the Decision of the Batusangkar District Court Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk The research method used is normative juridical with a case approach. As for the findings in this study, namely land title certificates issued using fake letters, of course they do not provide legal certainty. This certificate can be classified as an original but fake certificate. Certificates of this kind, of course, must be canceled and declared invalid and withdrawn from circulation after being proven through a process at the District Court. To prevent genuine but fake certificates from occurring, namely by increasing the accuracy of the officials who process the making and issuing of certificates of land rights. Consideration of the Panel of Judges in the Decision of the Batusangkar District Court Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk that the Defendant was legally and convincingly proven at trial to fulfill the criminal elements charged by the Public Prosecutor, namely Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. So that the Panel of Judges sentenced the Defendant to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months.

Keywords: Legal Certainty, Certificates, Publishing Land Rights, and Fake Letters